

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Oleh :

**Hepita Erika Utama
2263201014**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya potensi bencana alam di Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan abrasi pantai yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam upaya mitigasi bencana, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi kebencanaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan, pejabat fungsional BPBD, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan teori Peran Pemerintah dalam Pembangunan menurut Ryaas Rasyid (2000), yang meliputi peran pemerintah sebagai regulator, pelayan publik, dan pemberdaya masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan perannya dalam meningkatkan mitigasi bencana melalui fungsi regulator, pelayan publik, dan pemberdaya masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah daerah telah menyusun peraturan daerah, kebijakan tata ruang berbasis risiko bencana, serta melakukan pengawasan terhadap keselamatan lingkungan dan bangunan. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah menyediakan informasi dan edukasi kebencanaan, sarana dan prasarana mitigasi, sistem peringatan dini, serta pelayanan kesiapsiagaan bencana. Sebagai pemberdaya masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana, pembentukan kelompok siaga bencana, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan mitigasi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, belum meratanya edukasi kebencanaan, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Mitigasi Bencana, BPBD, Pelayan Publik, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN ENHANCING DISASTER MITIGATION IN SOUTH BENGKULU REGENCY

By:

Hepita Erika Utama

2263201014

This study aimed to examine and describe the role of the local government in enhancing disaster mitigation in South Bengkulu Regency. The study was motivated by the region's high vulnerability to natural disasters, including floods, landslides, earthquakes, extreme weather, and coastal abrasion, which pose significant threats to public safety. In addition, several challenges remain in disaster mitigation efforts, such as limited disaster awareness and education, inadequate supporting facilities and infrastructure, and suboptimal coordination between the local government and the community in responding to disaster risks.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The data were collected through observations, interviews, and documentation. The research informants included the Secretary of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Bengkulu Regency, BPBD functional officers, and community members. Data were analyzed using Ryaas Rasyid's (2000) theory of the government's role in development, which identifies three key functions of government: regulator, public service provider, and community empowerment agent.

The findings indicate that the local government has performed its role in enhancing disaster mitigation through its functions as a regulator, public service provider, and community empowerment agent. As a regulator, the local government has established regional regulations, disaster risk-based spatial planning policies, and environmental and building safety monitoring mechanisms. As a public service provider, it has delivered disaster information and education, mitigation facilities and infrastructure, early warning systems, and disaster preparedness services. As a community empowerment agent, the local government has conducted disaster mitigation awareness campaigns and training programs, established community-based disaster preparedness groups, and involved local communities in disaster mitigation planning. However, several challenges remain, including limited budget allocations, uneven distribution of disaster education, and the need to strengthen community participation in disaster risk reduction efforts.

Keywords: Local Government Role, Disaster Mitigation, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Public Service, Community Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi karena letak geografisnya berada di kawasan cincin api dunia (*ring of fire*) yang menyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Kondisi geografis tersebut menjadikan hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi risiko bencana yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dalam mengurangi risiko bencana melalui berbagai langkah mitigasi yang sistematis dan terencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun melalui penyadaran serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan, 2007).

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam hal penanggulangan bencana. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program, serta

melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi bencana guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu (Ridwan, 2018).

Mitigasi bencana pada dasarnya tidak hanya berfokus pada tindakan penanganan ketika bencana terjadi, tetapi lebih menekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, perencanaan tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek kerawanan bencana, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan (Nurjanah. et al., 2012). Dengan adanya upaya mitigasi yang baik, diharapkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana dapat diminimalkan.

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari daerah pesisir, perbukitan, serta daerah aliran sungai menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan gempa bumi. Selain itu, faktor curah hujan yang cukup tinggi pada musim tertentu juga dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

Beberapa kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam. Bencana banjir dan tanah longsor misalnya sering terjadi pada saat musim hujan yang disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti kerusakan hutan, alih fungsi lahan, serta sistem drainase yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan agar dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana dapat diminimalkan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

Dalam menghadapi berbagai potensi bencana tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program mitigasi bencana. Pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi risiko bencana, menyusun rencana penanggulangan bencana, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai kebencanaan (Heryati, 2020).

Namun dalam pelaksanaannya, upaya mitigasi bencana seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, maupun kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Selain itu, koordinasi antar lembaga

yang terlibat dalam penanggulangan bencana juga terkadang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program mitigasi bencana yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah (Rahman, 2021).

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, seperti melalui pembentukan desa tangguh bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta penyebaran informasi terkait potensi dan cara menghadapi bencana (Suryadi, 2020).

Selain itu, integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah juga menjadi hal yang sangat penting. Setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan aspek kebencanaan agar tidak menimbulkan risiko baru di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana (Kodoatie & Sjarief, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana sangatlah penting, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana seperti Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam

mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mitigasi bencana di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan program mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan dan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan juga diperkuat melalui berbagai regulasi dan dokumen perencanaan daerah. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, kelembagaan penanggulangan bencana, serta peran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan penanggulangan bencana juga dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program prioritas dalam meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Melalui kebijakan dan perencanaan tersebut, diharapkan upaya mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan

dapat berjalan lebih efektif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana bagi masyarakat (BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021).

Berikut adalah data bencana in dari tahun 2022-2026 di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 1.1
Rangkuman Kejadian Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan (2022–2026)

No	Jenis Kejadian Bencana / Musibah	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Total Per Bencana
1	Cuaca Ekstrem / Pohon Tumbang / Angin Puting Beliung	19	23	18	18	78
2	Tanah Longsor	12	17	4	1	34
3	Kebakaran (Pemukiman, Hutan, & Lahan)	9	14	13	4	40
4	Gempa Bumi	13	2	4	0	19
5	Banjir	5	5	8	0	18
6	Kejadian Air (Korban Tenggelam / Hanyut / Abrasi)	3	3	0	0	6
7	Pencarian Orang Hilang	1	1	0	0	2
8	Jembatan Putus	1	0	0	0	1
9	Kekeringan	0	0	0	0	0
-	TOTAL KEJADIAN PER TAHUN	63	65	47	23	198

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, 2026

Berdasarkan data rekapitulasi kebencanaan di Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2022–2026, akumulasi kejadian bencana secara keseluruhan tercatat sebanyak 198 peristiwa, dengan fluktuasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 (65 kejadian) dan tren yang berangsur menurun secara signifikan hingga tahun 2026 (23 kejadian). Sepanjang periode tersebut, ancaman hidrometeorologi basah yang dipicu oleh faktor atmosferis menempati urutan paling dominan, di mana fenomena cuaca ekstrem (termasuk pohon tumbang dan angin puting beliung) menjadi bencana paling sering terjadi dengan total

78 kasus, disusul oleh kejadian tanah longsor sebanyak 34 kasus yang kerap melumpuhkan jalur lintas darat, serta bencana kebakaran dan gempa bumi yang terus mengancam stabilitas struktural kawasan. Fakta ini menegaskan bahwa Bengkulu Selatan memiliki tingkat kerentanan geografis yang sangat tinggi terhadap dinamika cuaca lokal dan aktivitas tektonik, sehingga menuntut penguatan regulasi penataan ruang, keandalan sistem pelayanan informasi peringatan dini, serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dari pemerintah daerah guna meminimalkan risiko kerugian materiil maupun korban jiwa di masa mendatang.

Observasi awal di Kabupaten Bengkulu Selatan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Namun demikian, upaya mitigasi bencana yang dilakukan dinilai masih belum maksimal, terlihat dari masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan bencana, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung mitigasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Di Kabupaten Bengkulu Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan kajian ilmu administrasi publik dan kebijakan publik
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan mitigasi bencana. Hasil penelitian dapat memperkaya konsep peran pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana di tingkat lokal.
2. Penguatan teori mitigasi bencana berbasis wilayah
Secara teoritis, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang mitigasi bencana yang berbasis karakteristik wilayah dan komunitas

lokal. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi empiris untuk menguji teori mitigasi bencana yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana oleh pemerintah daerah.

3. Referensi akademik bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi peneliti berikutnya yang mengkaji peran pemerintah daerah, mitigasi bencana, dan tata kelola penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, khususnya di daerah rawan bencana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan, program, dan koordinasi mitigasi bencana, khususnya di Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna.

2. Bagi Aparatur dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai peran kelurahan, BPBD, dan lembaga terkait dalam upaya mitigasi bencana, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan program mitigasi bencana di tingkat lokal.

3. Bagi Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, sehingga

masyarakat lebih siap, tanggap, dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi.

4. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan contoh dan referensi dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dan mitigasi bencana, khususnya dalam konteks wilayah pesisir atau daerah rawan bencana.

